

**ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA
YUDIKATIF DALAM PUTUSAN YANG BERSIFAT *POSITIVE LEGISLATURE*
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009)**



**Penulisan Hukum
(SKRIPSI)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas**

Maret Surakarta

Oleh:

DYAH ISWARI

NIM. E0012127

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI
LEMBAGA YUDIKATIF DALAM PUTUSAN YANG BERSIFAT
POSITIVE LEGISLATURE
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009)**

Oleh:

DYAH ISWARI

NIM. E0012127

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 27 Oktober 2016

Pembimbing I



Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum.

NIP.19780512003121002

Pembimbing II



Jadmiko Anom H, S.H.,M.H.

NIP.197004241995121001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)



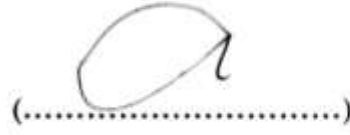
**ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI
LEMBAGA YUDIKATIF DALAM PUTUSAN YANG BERSIFAT
POSITIVE LEGISLATURE (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009)**

Oleh :
Dyah Iswari
E0012127

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari/ Tanggal : Senin, 16 Januari 2017

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Nama | : Suranto S.H., M.H. |  |
| NIP Penguji | : 195608121986011001 | (.....) |
| 2. Nama | : Jadmiko Anom
Husodo, S.H., M.H. |  |
| NIP Pembimbing II | : 197004241995121001 | (.....) |
| 3. Nama | : Dr. Isharyanto
S.H., M.Hum |  |
| NIP Pembimbing I | : 197805012003121002 | (.....) |



Mengetahui,
Dekan


Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19601107 198601 1 001

PERNYATAAN

NAMA : DYAH ISWARI

NIM : E0012127

PERNYATAAN

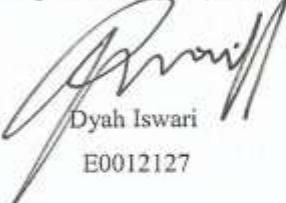
NAMA : DYAH ISWARI

NIM : E0012127

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: **ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA YUDIKATIF DALAM PUTUSAN YANG BERSIFAT *POSITIVE LEGISLATURE*** (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 22 November 2016

Yang membuat pernyataan ini



Dyah Iswari
E0012127

MOTTO

"*Jer basuki mawa beya* (semua usaha memerlukan pengorbanan)"

-Pepatah Jawa-

“Orang-orang itu telah melupakan bahwa belajar tidaklah melulu untuk mengejar dan membuktikan sesuatu, namun belajar itu sendiri, adalah perayaan dan penghargaan pada diri sendiri”

-Andrea Hirata-

“The future depends on what you do today”

-Mahatma Gandhi-

PERSEMBAHAN

**Dengan mengucapkan syukur, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:
Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa memberikan rejeki yang berlimpah
kepada Penulis**

**Orang Tua Penulis, Bapak Haryanto dan Ibu Wuryandari yang telah secara sabar dan
ikhlas menuntut serta mengajari Penulis untuk selalu berbuat baik dan bersyukur,
serta melimpahkan kasih dan sayangnya kepada Penulis**

**Kedua Kakak Penulis, Arum Sekaringtyas dan Istining Dyah Pertiwi, kakak serta
teman yang selalu berbagi kepada Penulis dalam segala hal**

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Dyah Iswari, E0012127. 2016. ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA YUDIKATIF DALAM PUTUSAN YANG BERSIFAT POSITIVE LEGISLATURE (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009).Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini mengupas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislature*. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* adalah Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Permasalahan yang dibahas ialah Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature*. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-VII/2009 adalah putusan lembaga yudikatif yang bersifat *positive legislature*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yang bersifat preskriptif Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, perbandingan dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah kajian pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah logika deduktif. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan, yakni putusannya bersifat *positive legislature*, yang mana seharusnya sifat *positive legislature* merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Permasalahan ini akan dielaborasi lebih lanjut oleh Penulis untuk memperoleh pembuktian kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *positive legislature*.

Kata kunci: pengujian undang-undang, *positive legislature*, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Dyah Iswari, E0012127. 2016. THE ANALYSIS ON THE AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT AS A JUDICIAL BODY IN ITS POSITIVE LEGISLATURE'S DECISIONS (STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION No. 102 / PUU-VII / 2009). Law Faculty Universitas Sebelas Maret.

This legal writing explores the authority of the Constitutional Court on delivering its decision that is, as referred to as a positive legislature. One of the Constitutional Court's positive legislature decisions is Decision No. 102 / PUU-VII / 2009 on judicial review of Article 28 and Article 111 paragraph (1) of Law Number 42 Year 2008 regarding General Election of President and Vice President. The problems that will be discussed are: How does the authority of the Constitutional Court in making a positive legislature decision. Does the constitutional court decision number 102 / PUU-VII / 2009 belong to decision of the judiciary body which is positive Legislature. This research is a doctrinal legal research, which is prescriptive. The approaches used in this research are the approach of legislation, comparison approach and case approach. The technique of collecting the legal materials used is a literature study. The analysis technique used is the deductive logic. The authority of judicial review of the Constitution is one of the Constitutional Court's authority as an executor of judicial power. Constitutional Court's decisions as time passes have progressed, the decisions of which referred to as a positive legislature, however it should have been the lawmakers ruling the positive legislature. This problem will be further elaborated by the author to obtain proofs on the authority of the Constitutional Court issues a decision as referred to as a positive legislature.

Keywords: judicial review, positive legislature, the constitutional court

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Konsekuensi Hukum Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Yudikatif dalam Putusan yang Bersifat *Positive Legislature* (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009)” dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulisan ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
2. Bapak Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dorongan, semangat, dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dorongan, semangat, dan bimbingan dalam menyusun dan menyempurnakan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Pujiono SH., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang memberikan arahan dalam menempuh masa kuliah;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan hukum kepada Penulis, semoga bekal ilmu tersebut dapat Penulis gunakan dan amalkan sebagai bekal Penulis di masa yang akan datang;
6. Kedua orang tua Penulis, Bapak Haryanto dan Ibu Wuryandari, terima kasih untuk doa, semangat, persahabatan, dan inspirasi yang tidak henti-hentinya diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Kedua saudara Penulis, Arum Sekaringtyas dan Istining Dyah Pertiwi yang selalu mau berbagi dalam kondisi apapun, baik senang ataupun sedih;
7. Sahabat super penulis, UM, Sulistiani, Khansa Tsabita, Eka Nurjanah, dan Yonawan Ratna atas pertemanan yang sederhana tapi amat sangat menakjubkan. Bangku perkuliahan menjadi sangat berwarna dan menarik karena kalian;
8. Kepada Nur Ayu Pratiwi, teman terkasih dan tersayang penulis yang selalu sabar untuk berdiskusi dalam segala hal yang tak henti hentinya memberikan dukungan dan semangat;

9. Keluarga Besar KSP “Principium” FH UNS yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman organisasi yang luar biasa menegangkan, menakjubkan dan mengharukan;
10. Keluarga Besar Komunitas Debat Fakultas Hukum UNS yang telah luar biasa memberikan ilmu-ilmunya. *Glory Victory Superior!*;
11. Keluarga Besar Solo Mengajar yang telah memberikan banyak ilmu dalam melatih kesabaran dan semangat untuk mencerdaskan anak bangsa;
12. Seluruh rekan mahasiswa-mahasiswi angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; dan
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Karya yang penulis susun guna memperoleh derajat kesarjanaan ini semoga dapat turut serta menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum. Akhir kata semoga penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat.

Surakarta, 22 November 2016

Penulis

DYAH ISWARI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	16
1. Tinjauan tentang Pemisahan Kekuasaan	16
2. Tinjauan tentang Kekuasaan Kehakiman.....	20
3. Tinjauan tentang Lembaga Yudikatif.....	22
4. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi.....	24
5. Tinjauan tentang <i>Positive Legislature</i>	31
B. Kerangka Pemikiran	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat <i>Positive Legislature</i>	38
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 adalah	

Putusan Lembaga Yudikatif yang Bersifat <i>Positive Legislature</i>	67
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	45
Tabel 2.....	47
Tabel 3.....	48
Tabel 4	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	35
Gambar 2.....	95
Gambar 3.....	95